LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BOGOR

PENGANTAR

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis intansi.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Madya Bogor. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Bogor, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
DWI BUDI ISWAHYU
19701102 199012 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. GAMBARAN UMUM KPP MADYA BOGOR 4
B. PERAN STRATEGIS 7
C. RENCANA STRATEGIS 7
D. SISTEMATIKA LAPORAN 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. PENETAPAN KINERJA 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 14
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA 17
C. REALISASI ANGGARAN 23
BAB IV PENUTUP 25
A. KESIMPULAN 25
B. RENCANA AKSI TAHUN 2025 25
LAMPIRAN 27
A. PENGHARGAAN 27

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KPP MADYA BOGOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi KPP Madya Bogor adalah sebagai berikut.

Kedudukan

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembentukan 23 unit kantor, salah satu di antaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor yang berada di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat III. KPP Madya Bogor merupakan perluasan atau pemecahan dari KPP yang berada di wilayah Jawa Barat III. Saat mulai Operasi (SMO) KPP Madya Bogor pada tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan KEP-167/PJ/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Pada awal didirikan, KPP Madya Bogor beralamat di Jalan Pangrango Nomor 23 Bogor Tengah, Bogor. Namun, sejak 13 Juli 2020 KPP Madya Bogor resmi menempati gedung baru yang beralamat di Gedung Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Lantai 2-3 Jalan Ir. H. Djuanda No.64 Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor.

Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Madya Bogor sebanyak 2.580 WP yang wilayah kerja yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

Tugas

Tugas utama KPP Madya Bogor sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hokum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan pasal 57B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PM K-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Bogor menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
j. pemutakhiran basis data perpajakan;
k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
p. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi

KPP Madya Bogor terdiri dari beberapa sub/seksi/kelompok dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, yaitu:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

e. Seksi Pengawasan I;
f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. SeksiPengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V;
j. Seksi Pengawasan VI; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

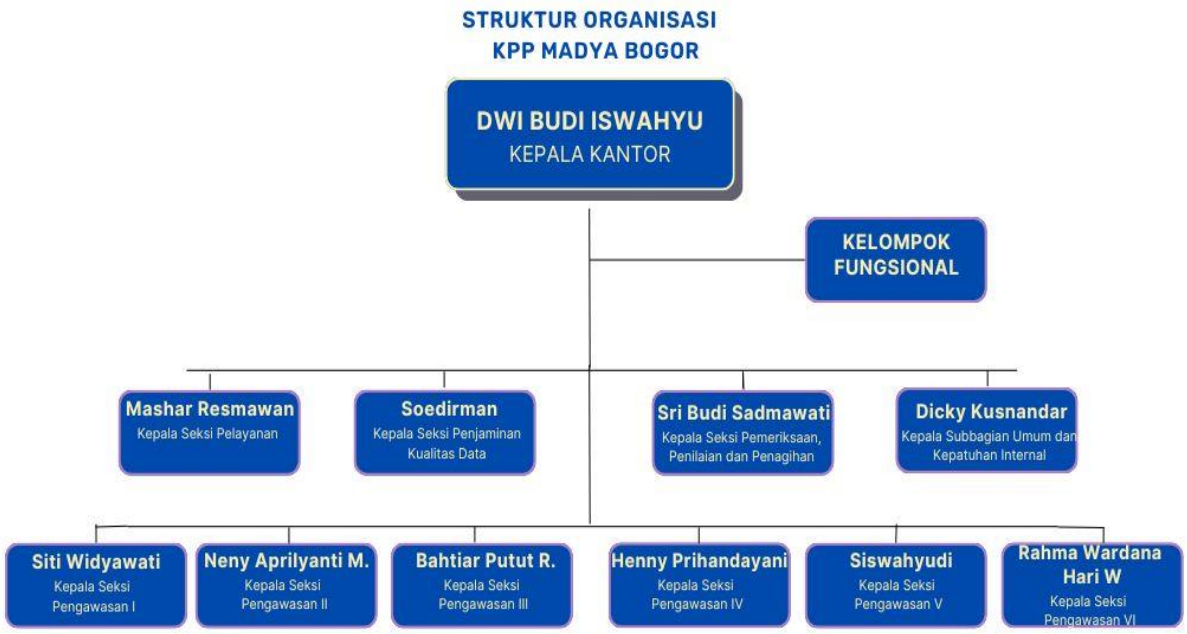

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPP Madya Bogor pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 114 pegawai yang terbagi secara proporsional berdasarkan beban di setiap sub/seksi/kelompok. Berikut statistik pegawai KPP Madya Bogor berdasarkan tingkat pendidikan formal dan generasi.

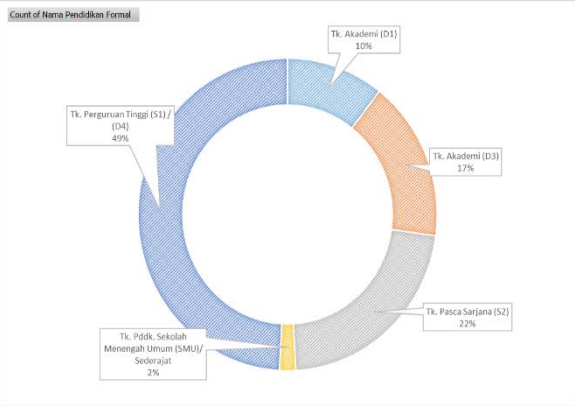

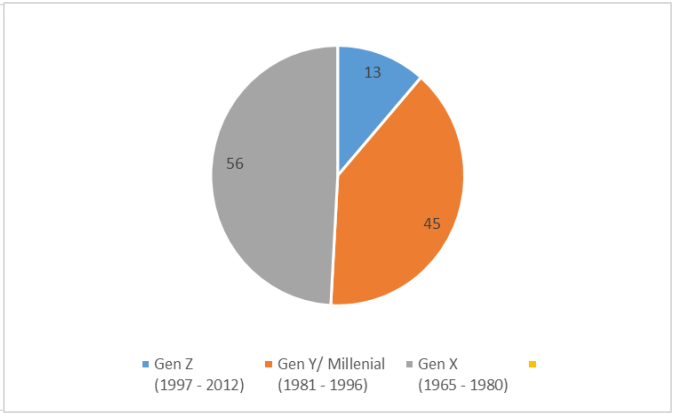

Bagan I.1 Statistik Pegawai berdasarkan pendidikan

Bagan I.2 Statistik Pegawai berdasarkan Generasi

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, KPP Madya Bogor memegang peran strategis dalam mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra KPP Madya Bogor mengacu pada Renstra atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Renstra KPP Madya Bogor tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah.

Visi

Visi KPP Madya Bogor mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yaitu:

> *"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa melalui Penyelenggaraan Administrasi yang Efesien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".*

Misi

c) *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
c) *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
c) *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermovitasi.*

Secara kelembagaan, KPP Madya Bogor mempunyai misi internal yang bersifat mendukung pelaksanaan misi-misi lainnya, yaitu memberikan pelayanan optimal demi mencapai penerimaan negara.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk penjabaran atas pencapaian kinerja KPP Madya Bogor selama tahun 2024. Capaian kinerja *(performance results)* 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja *(performance agreement)* 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Madya Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan secara ringkas hal-hal yang bersifat umum tentang KPP Madya Bogor, yaitu kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi; peran strategis; serta sistematika pelaporan.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menguraikan secara singkat tentang perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2024.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Dalam tahun pajak 2024 rencana kinerja untuk pencapaian target penerimaan pajak KPP Madya Bogor semula ditetapkan sebesar Rp.10.603.831.920.858,- berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III nomor KEP-63/WPJ.33/2024 yang kemudian diubah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Nomor KEP-260/WPJ.33/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Nomor KEP-258/WPJ.33/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Nomor KEP-188/WPJ.33/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.10.911.307.184.000,-

Penetapan kinerja merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya. Rencana kinerja KPP Madya Bogor merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala KPP Madya Bogor.

Adapun penetapan kinerja KPP Madya Bogor untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sector pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7		07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%

	Penegakan hukum yang efektif	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis tersebut, KPP Madya Bogor menjabarkan sasaran strategis dalam beberapa inisitif strategis. Adapun inisiatif strategis yang dilakukan KPP Madya Bogor adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis
1	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Melakukan pengawasan melalui pembentukan Tim Penggalian Potensi
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak
3	Persentase capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	Melakukan pengawasan terhadap pelaporan pajak

Tabel II.2 Inisiatif Strategis KPP Madya Bogor Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Madya Bogor adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja KPP Madya Bogor tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Madya Bogor untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	101,66
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,66
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,93	Max	P/L	19%	42,22%	103,93
Customer Perspective							20,00%	103,98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,80
2a-CP	Persentase realisasi	100,00%	99.99%	Max	E/L	26%	57,78%	99,99

	penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,50%	Max	P/L	19%	42,22%	118,50
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,15
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	Max	E/M	21%	100,00%	100,15
Internal Process Perspective							25,00%	116,23
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,91
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105,81%	Max	E/M	21%	50,00%	105,81
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,75%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan							115,56

	material yang efektif							
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	106,68%	Max	P/M	14%	33,33%	106,68
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,92%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,12
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							110,24
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan	100,00	116,97	Max	P/M	14%	33,33%	116,97

	kegiatan kebintalan SDM							
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,93	Max	P/M	14%	33,33%	109,33
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,00	Max	P/M	14%	33,33%	104,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,14

Tabel III.1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Madya Bogor

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a – CP : Persentase realisasi penerimaan pajak

Penerimaan pajak KPP Madya Bogor tahun 2024 tercapai sebesar 100%. Kinerja penerimaan tahun 2024 mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan dengan capaian penerimaan pajak tahun 2023 yaitu di angka 10,35%.

Target capaian untuk persentase realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 100%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sehingga pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercapai yaitu:

a. Wajib Pajak melakukan Pembayaran atas SP2DK DPP dan Outstanding;
b. melakukan analisis mandiri laporan keuangan secara komprehensif;
c. melakukan Penerbitan STP atas tahun berjalan dan sebelumnya;
d. melakukan pengawasan pembayaran rutin; dan
e. melakukan analisa atas data-data yang ada di Apportal dan data eksternal lainnya.

1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada Triwulan IV tahun 2024 adalah 103,93% yang berarti telah melebihi target sebesar 3,93%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sehingga pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercapai yaitu:

a. melakukan pengawasan pembayaran PPM; dan
b. melakukan Imbauan pembayaran dan pelaporan atas kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sehingga penerimaan dari kegiatan PPM tercapai yaitu:

a. melakukan penelitian atas data matching tahun berjalan di Approweb;
b. melakukan pengawasan pembayaran rutin;
c. melakukan tindak lanjut atas data eksternal; dan
d. melakukan pengawasan atas Data Pemicu Approweb.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis pada triwulan IV adalah 118,50% yang mana KPP Madya Bogor telah melebihi target sebesar 18,50%. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu:

a. melakukan inventarisir dan komunikasi intensif terhadap wajib pajak dengan status wajib lapor namun belum melaporkan SPT Tahunan; dan
b. melakukan kunjungan (advisory visit) sebagai upaya persuasif kepada wajib pajak.

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100% yang artinya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu :

a. menindaklanjuti SP2DK Outstanding sebelum tahun berjalan;
b. menindaklanjuti Data Pemicu dan analisis mandiri dengan menerbitkan SP2DK; dan
c. melakukan pairing atau bedah wajib pajak dengan Supervisor dalam rangka penerbitan SP2DK Komprehensif

Edukasi dan Pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar tahun 2024 tercapai sebesar 88,80% dari target sebesar 74% dengan Indeks Capaian sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan langsung secara aktif.

Materi penyuluhan yaitu terkait peraturan dan aplikasi terbaru, serta dilakukan penyuluhan one on one kepada Wajib Pajak yang diketahui terlambat lapor atau bayar.

Tujuan penyuluhan yaitu untuk:

a. meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan;
b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan; dan
c. meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Capaian Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 terealisasi sebesar 105,81 dari target sebesar 100. Angka capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini berarti

pengguna layanan sudah cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh KPP Madya Bogor serta kegiatan penyuluhan sudah dilaksanakan cukup baik.

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada triwulan IV tahun 2024 adalah 118,75% yang artinya telah melebihi target yakni sebesar 28,75%.

Adapun tindakan yang telah dilakukan yaitu melakukan Pengawasan Pembayaran Rutin maupun menerbitkan surat teguran atas pelaporan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 PPh Final, PPh Pasal 23, dan PPN).

Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Realisasi pengawasan pembayaran masa WP Strategis pada triwulan IV tahun 2024 adalah 120% dari target 100%, hal ini berarti telah melebihi target sebesar 20%. Tindakan yang telah dilakukan sehingga tercapainya IKU 6aC-P yaitu:

a. melakukan invenatarisir pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk dilakukan penelitian;
b. penerbitan SP2DK atas data selain tahun berjalan dengan analisa komprehensif; dan
c. melakukan klarifikasi data selain tahun berjalan kepada wajib pajak untuk dilakukan penyetoran atau pembetulan SPT.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah 120% dari target 100%, hal ini berarti telah melebihi target sebesar 20%. Tindakan yang telah dilakukan yaitu melakukan invenatarisir pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk dilakukan penelitian.

6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan tahun 2024 adalah 106,68% dari target 100%. Tindakan yang telah dilakukan sehingga tercapainya target yaitu memaksimalkan proses usulan pemeriksaan khusus DSPP RBP dan DSPP Rekomendasi mulai dari proses penelitian terhadap Wajib Pajak, membuat KKA, dan proses penginputan usulan di PortalP2.

Penegakan Hukum yang Efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada triwulan IV tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 120% sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Tindakan yang telah dilakukan yaitu:

a. Proses Pemeriksaan telah dilaksanakan semaksimal mungkin mulai dari administrasi penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) hingga terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan administrasi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).
b. Secara aktif memantau jatuh tempo pemeriksaan dan mengingatkan untuk akselerasi percepatan pemeriksaan.
c. Melakukan koordinasi dengan fungsi lain dalam rangka penggalian potensi perpajakan melalui kegiatan penilaian.

7b – CP : Tingkat efektivitas penagihan

Realisasi nilai efektivitas penagihan pada triwulan IV tahun 2024 adalah 119,92%. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 75%. Tindakan penagihan aktif telah dilaksanakan secara maksimal dari mulai Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitan, Penjualan barang sitaan, serta pencegahan. Selain tindakan tersebut, terdapat beebrapa tindakan lainnya, yaitu:

1. melakukan tindak lanjut tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar DSPC agar mendapatkan pencairan yang maksimal;
2. melakukan input Wajib Pajak non DSPC yang memiliki potensi pencairan untuk diinput menjadi DRM penagihan;dan
3. mengundang Wajib Pajak dalam rangka pembahasan penyelesaian tunggakan pajak sebagai upaya percepatan pencairan piutang pajak.

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar 100%. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dengan UE II atas usulan Bukti Permulaan yang telah disampaikan pada tahun 2024.

Data dan informasi yang berkualitas

8ac-P Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

Realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tahun 2024 sebesar 120%. Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Tim Pengamatan KPP terkait tindak lanjut surat perintah pengamatan.

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Realisasi persentase tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM pada Tahun 2024 adalah 116,97% yang artinya telah memenuhi target yang diberikan yakni sebesar 100%.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Realisasi hasil penilaian integritas KPP Madya Bogor tahun 2024 adalah 92,93% dengan indeks capaian sebesar 109,33%. Capaian KPP Madya Bogor tahun 2024 sudah baik dimana berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan (responden eksternal), nilai integritas KPP Madya Bogor dapat dinilai sangat baik.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Realisasi untuk tingkat efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Madya Bogor Tahun 2024 adalah 94% dengan indeks capaian sebesar 104,44%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sudah dilakukan dengan baik melebihi target yang ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada tahun 2024 kualitas pelaksanaan anggaran tercapai 120% dari target 100%. Pencapaian target ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan KPP Madya Bogor Tahun 2024 sudah baik dan sesuai dengan penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran KPP Madya Bogor pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Pagu	%
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,271,825,000	1,170,356,617	28,132,773	97.79
WA	Program Dukungan Manajemen	3,820,004,000	3,353,440,610	82,847,748	97.83

Adapun realisasi belanja per jenis belanja pada KPP Madya Bogor adalah sebagai berikut.

NO	KODE | NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	119168 | KPP MADYA BOGOR	PAGU	986,932,000	4,034,457,000	83,725,000	0	0	0	0	0	0	5,105,114,000
		REALISASI	946,648,000	3,950,002,829	83,638,200	0	0	0	0	0	0	4,980,289,029
			(95.92%)	(97.91%)	(99.90%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(97.55%)
		SISA	40,284,000	84,454,171	86,800	0	0	0	0	0	0	124,824,971
GRAND TOTAL		PAGU	986,932,000	4,034,457,000	83,725,000	0	0	0	0	0	0	5,105,114,000
		REALISASI	946,648,000	3,950,002,829	83,638,200	0	0	0	0	0	0	4,980,289,029
			(95.92%)	(97.91%)	(99.90%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.55%)
		SISA	40,284,000	84,454,171	86,800	0	0	0	0	0	0	124,824,971

Dengan indikator pelaksanaan anggaran sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	'023	'015	119168	KPP MADYA BOGOR	Nilai	100	100	97,02	100	100	100	100	99,4	100%	0	99,4
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10	15	19,4	10	10	10	25				
					Nilai Aspek	100		99,26				100				

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan 19 IKU yang telah mencapai target. Tercapainya penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor tahun 2024 sebesar 100% dari target yang telah diberikan, tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Dalam rangka meminimalisasi kendala yang mungkin timbul pada periode berikutnya, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu:

a. menyusun rencana strategis tahun berikutnya dengan mengoptimalkan potensi berbagai sumber daya yang ada;
b. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan kegiatan *In House Training*, *e-learning*, diklat, dan sebagainya; dan

c. melakukan optimalisasi dan mitigasi dengan membuat komposisi anggaran pada awal tahun berikutnya dengan mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran yang baru terjadi di awal tahun 2025.

LAMPIRAN

A. PENGHARGAAN

Pada Tahun 2024, KPP Madya Bogor mendapatkan beberapa piagam penghargaan dari berbagai aspek kinerja, diantaranya sebagai berikut:

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

KPP Madya Bogor

Sebagai

Kantor Pelayanan Pajak dengan Kinerja Penagihan Terbaik Ketiga di Klaster Kantor Pelayanan Pajak Madya Tahun 2023

JAKARTA, FEBRUARI 2024

DIREKTUR JENDERAL

SUBYO UTOMO
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Piagam Penghargaan atas Kinerja Penagihan

KPP Madya Bogor mendapat penghargaan dengan Kinerja Penagihan Terbaik Ketiga di Klaster KPP Madya Tahun 2023

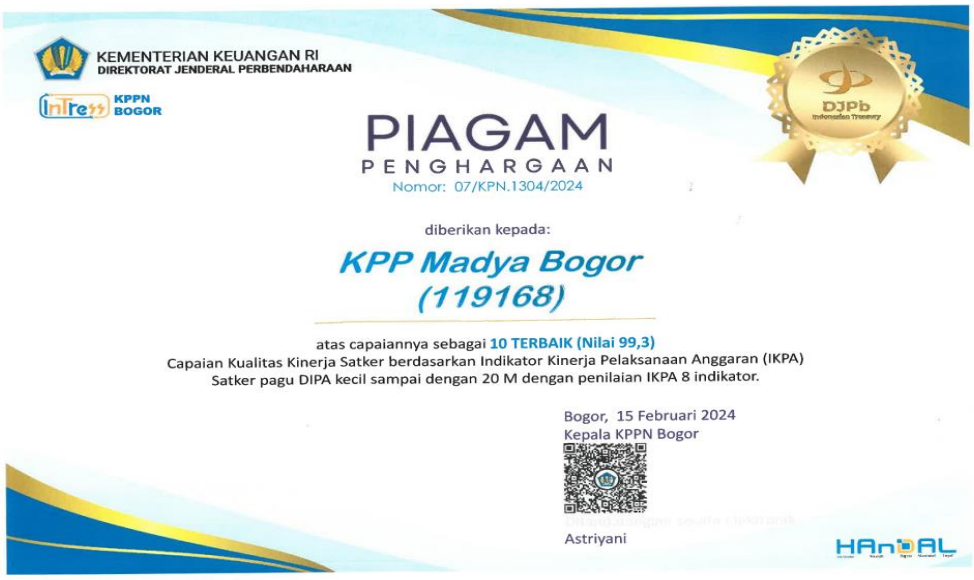
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KPPN BOGOR

DJPb

PIAGAM
PENGHARGAAN
Nomor: 07/KPN.1304/2024

diberikan kepada:

KPP Madya Bogor
(119168)

atas capaiannya sebagai 10 TERBAIK (Nilai 99,3)
Capaian Kualitas Kinerja Satker berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satker pagu DIPA kecil sampai dengan 20 M dengan penilaian IKPA 8 indikator.

Bogor, 15 Februari 2024
Kepala KPPN Bogor

Astriyani